



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah satu dasa warsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, permasalahan klasik seperti, kesenjangan pelayanan dan pembangunan, kemiskinan, ego lokal, dan tumpang tindih perencanaan masih saja menjadi isu utama pembangunan nasional. Di sisi lain, tekanan globalisasi tiada henti menggempur dan menuntut kekuatan daya saing yang tidak mengenal batas administratif (kedaerahan). Globalisasi memunculkan adanya saling ketergantungan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam konteks daerah, globalisasi juga sangat berpengaruh pada dinamika pembangunan daerah.

Pembangunan daerah dalam kaitannya pada pelaksanaan otonomi daerah, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdayaguna dan berhasilguna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga dilaksanakan melalui pengaturan sumberdaya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) tahun 2004-2009, khususnya program dan kegiatan di bidang revitalisasi dan otonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada ketidakselarasan antara tataran rencana dan tataran praktis, antara harapan dan kenyataan. Ketidakselarasan ini dapat terjadi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini pada gilirannya akan membawa dampak tertentu, baik terhadap pelaksanaan dan pengembangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri secara keseluruhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



maupun dalam jangka waktu yang lebih pendek, terhadap perumusan kebijakan yang terkait.

Muhammad (2007) menyatakan bahwa implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah menuntut daerah untuk melaksanakan secara mandiri, baik dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaannya. Masing-masing daerah dituntut secara kreatif untuk mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan perubahan lingkungan baik secara politik, sosial dan ekonomi. Demokratisasi yang berjalan seiring dengan adanya otonomi daerah telah menciptakan lingkungan politik pemerintahan daerah yang sangat dinamis.

Kesadaran untuk menggunakan hak-hak politik dari para pemuka kepentingan terus menarik kemampuan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dari sisi ekonomi, perubahan lingkungan pemerintahan akan terjadi seiring dengan adanya globalisasi dan liberalisasi pasar. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dihadapkan pada kompetisi yang semakin terbuka, bukan hanya dengan pemerintah daerah lain di Indonesia, tetapi juga dengan pemerintah daerah lain yang ada di seluruh dunia, dalam perebutan sumberdaya ekonomi yang terbatas. Dalam bidang sosial, perubahan lingkungan dapat diamati dengan tergerusnya nilai-nilai dan tradisi yang selama ini menjadi modal sosial bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang akhirnya akan mengancam Ketahanan Nasional yang ada.

Muhammad (2008) menjelaskan bahwa dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi sebagai eksese dari pelaksanaan otonomi daerah, maka seorang Kepala Daerah tidak hanya dituntut dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan sehari-hari, tetapi juga mengembangkan kreatifitas dan inovasi untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Dengan kata lain seorang Kepala Daerah harus memiliki jiwa *entrepreneur*. Nilai-nilai dan semangat *entrepreneur* yang mengajarkan keberanian dalam mengambil keputusan dan resiko, kemampuan untuk merespon peluang dengan cepat, orientasi kepada masyarakat pengguna, perhatian terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

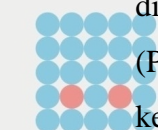


output dan kinerja serta inovasi, mampu memberikan pencerahan terhadap para Kepala Daerah yang selama ini cenderung dibelenggu oleh nilai dan tradisi yang mengandalkan kepatuhan pada peraturan dan prosedur, rutinitas dan kepastian, serta orientasi pada kekuasaan.

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut kemandirian, telah mendorong Kepala Daerah untuk menerapkan kreatifitas dalam berfikir dan inovasi sebagai kata kunci dalam *entrepreneur* dalam berbagai hal. Diantaranya adalah dengan meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi, mengembangkan usaha daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi. Hal-hal tersebut pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen penghasilan daerah yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kejala Daerah yang secara struktural merupakan pemimpin formal masyarakat daerah dan berperan mutlak sebagai penyelenggara negara, harus dapat mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang ada di daerahnya, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan ketertinggalan dengan daerah yang lain, sehingga dengan teratasinya permasalahan tersebut, pemerintah daerah akan dapat mengayomi dan mensejahterakan masyarakat yang ada didaerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama kurang lebih hampir satu dekade memiliki banyak hambatan atau kendala, baik kendala teknis maupun kendala non teknis. Berbagai kendala yang dapat mengganggu implementasi otonomi daerah diantaranya adalah:

1. adanya tuntutan tentang otonomi daerah oleh berbagai daerah di Indonesia yang sebenarnya lebih bermuatan politis dibandingkan ekonomis. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman otonomi daerah oleh sebagian daerah masih diartikan sebagai sebuah instrumen untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pemasukan daerah dan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional daerahnya (Malarangeng, 2001).
2. ketidaksamaan persepsi para aparatur pusat dan daerah tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2003).





3. bentuk pendelegasian wewenang yang belum jelas kepada daerah, belum baiknya akuntabilitas pemerintahan daerah, ketidaksiapan sumberdaya manusia di daerah, dan sistem politik yang belum kondusif.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan pada era otonomi daerah seyogyanya berfikir kreatif untuk menggali secara optimal sumberdaya di daerahnya, sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah, produktivitas daerah dapat meningkat yang akan berimplikasi juga terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu menggali partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah yang secara langsung berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah sangat diharapkan perannya dalam mewujudkan kemandirian di daerahnya dengan mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social-welfare), kehidupan demokrasi yang semakin maju, adanya rasa keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi, baik hubungan vertikal antara pusat dengan daerah maupun hubungan horizontal antar daerah, yang nantinya akan berimplikasi terhadap terwujudnya Ketahanan Daerah yang tangguh.

Kepemimpinan pada dekade terakhir ini dituntut untuk lebih memfokuskan bagaimana peran pemimpin dalam organisasi, sehingga akan membawa dampak positif terhadap organisasi. Kaitan antara kinerja organisasi dengan sumberdaya manusia dalam proses penyelenggaraan organisasi publik sesungguhnya bermuara pada kemampuan daerah untuk mempersiapkan jajaran birokrasi yang ada bagi penyelenggaraan pelayanan publik secara optimis dan berdaya guna. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi yang berbasis pada kemampuan daerah dengan memberikan pelayanan publik secara mandiri, terpadu, dan efektif. Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilukada harus mampu mengemban amanah rakyat di daerah yang begitu besar untuk memajukan daerahnya yang mungkin selama ini masih jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain.

Untuk itu, Kepala Daerah harus mampu memimpin daerahnya pada era otonomi daerah, sehingga daerahnya semakin berkembang, maju, dan unggul



dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya daerah yang ada. Salah satu konsep penting yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam rangka memajukan daerahnya adalah konsep kewirausahaan. Dengan kepemimpinan yang dilandasi dengan jiwa *entrepreneur*, Kepala Daerah diharapkan untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya, sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin terwujud yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Lumpkin dan Dess (1996) menyatakan bahwa esensi *entrepreneur* adalah terobosan baru (inovasi) atau disebut juga *entrepreneurial-orientation*. Pada dasarnya, *entrepreneurial-orientation* ditujukan pada suatu proses, praktik, dan aktivitas pengambilan keputusan yang menghasilkan suatu inovasi. Dalam kaitannya dengan kinerja Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah, Osborne dan Gaebler (1993) menjelaskan bahwa penerapan inovasi sebagai esensi dari konsep *entrepreneur* oleh pemerintah daerah pada era otonomi daerah telah menjadi suatu kebutuhan. Inovasi merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat bertahan dan unggul dalam persaingan pada era otonomi daerah. Muhammad (2007) menambahkan bahwa penerapan konsep kewirausahaan di suatu daerah dapat diamati dari berbagai bentuk perubahan, inisiatif, terobosan, dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi mengenai pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah seperti Propinsi Gorontalo dan Kabupaten Jembrana, Bali yang berhasil melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Kedua daerah tersebut telah membuktikan bahwa dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi setiap Kepala Daerah untuk mengurus dan memberdayakan seluruh potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan ketahanan daerah, membuat kedua daerah tersebut terpacu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memajukan daerahnya. Kedua daerah tersebut telah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga hal tersebut juga berimplikasi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerahnya (Muhammad, 2008 dan Alamsyah, 2007).





Keberhasilan para pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan kewirausahaan tidak hanya terdapat di dalam negeri. Bahkan teori dan praktek kepemimpinan kewirausahaan telah lebih dulu dipahami dan dilaksanakan di luar negeri yang membawa dampak positif terhadap kinerja organisasi dan pemerintahan. Doktrin *New Public Management* (NPM) yang didasarkan atas pengalaman Eropa, Amerika, Australia, dan New Zealand pada beberapa dekade terakhir secara berangsur-angsur dipromosikan ke dalam manajemen pemerintahan di berbagai negara termasuk negara berkembang (Ferlie *et al.*, 1996).

Doktrin NPM yang dipromosikan mengajak pemerintah untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung menggunakan sistem dan prosedur, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja atau hasil kerja. Pemerintah juga diajak untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil. Di samping itu, pemerintah juga diharapkan menerapkan sistem desentralisasi, memberi perhatian pada pasar, melibatkan sektor swasta, dan melakukan privatisasi (Hood, 1995).

Dampak dari model NPM tersebut yang mengarahkan para pemimpin untuk berperilaku *entrepreneur* terasa tidak saja di negara maju tetapi juga di negara berkembang. Pemberlakuan doktrin NPM dalam sistem pemerintahan telah membawa harapan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat karena lebih fleksibel, lebih cepat memberi respon terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah, lebih melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan daripada menunggu keputusan pemerintah pusat, lebih inovatif dengan memberi peluang dan melibatkan masyarakat di daerah dalam pengambilan keputusan dengan alternatif solusi yang lebih banyak, menghasilkan semangat kerja dan komitmen yang lebih tinggi, serta lebih produktif (Osborne dan Gaebler, 1993; Pollit dan Bouckaert, 2000).

Kasus keberhasilan pelaksanaan kepemimpinan yang dilandasi semangat kewirausahaan tersebut turut menginspirasi adanya penelitian ini karena dibutuhkan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan Kepala Daerah yang kuat



yang mampu memberdayakan seluruh potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah serta berimplikasi juga terhadap terciptanya Sistem Ketahanan Nasional yang tangguh. Untuk itu, penelitian mengenai peran kepemimpinan Kepala Daerah berbasis kewirausahaan dalam penerapan Sistem Ketahanan Nasional perlu dilakukan.

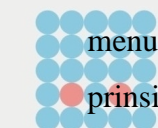
1.2 Perumusan Masalah

Kebijakan nasional tentang otonomi daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah telah menumbuhkan banyak harapan masyarakat daerah akan terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang. Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan pembangunan, maupun pembiayaannya melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

1. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah.
2. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) pada proses pembangunan.

Selain memberikan harapan, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah juga memberikan kekhawatiran terhadap munculnya pengaruh neoliberalisme di setiap daerah yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Neoliberalisme merupakan proyek normatif yang mengorganisir tata masyarakat menurut prinsip pasar bebas. Jika proyek liberalisme ekonomi bergerak dengan prinsip bahwa alokasi barang/jasa harus ditentukan oleh kinerja pasar, neoliberalisme melakukan radikalisme dengan menggagas semua relasi manusia ditentukan oleh kinerja pasar dan menuntut prinsip pasar diterapkan bukan hanya pada alokasi barang/jasa, akan tetapi pada berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini tidak sesuai diterapkan di Indonesia, karena neoliberalisme yang menganut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





paham kapitalisme tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Selain itu, pengalaman telah menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 lebih banyak ditopang oleh usaha yang bersifat kerakyatan, dimana hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, keterbatasan akan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan membiayai pembangunan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki daerahnya dapat menjadi penyebab kegagalan daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari penerapan otonomi daerah di beberapa daerah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir yang banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya (1) kewenangan yang tumpang tindih antara institusi pemerintah pusat dan daerah beserta aturan yang berlaku; dan (2) keinginan elit lokal yang cenderung ingin memanfaatkan otonomi daerah untuk memperkaya dirinya sendiri, melalui upaya dilakukan untuk memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan, seperti “putra daerah” dalam pemilihan Kepala Daerah, sehingga pada akhirnya, setelah berkuasa, terjadi pemanfaatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerahnya yang lebih didasarkan pada kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan elit politiknya.

Perilaku elit politik daerah yang menyimpang tersebut menimbulkan berbagai macam konflik horizontal antar warga. Konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah merupakan kesalahan persepsi tentang otonomi daerah yang oleh sebagian elit lokal hanya mempersepsikan otonomi daerah untuk memperkaya diri sendiri. Praktek-praktek otonomi daerah yang terjadi selama ini telah melahirkan berbagai ekse dan konsekuensi yang memungkinkan terjadinya berbagai konflik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk dan modus yang baru. Ekse dan konsekuensi tersebut disebabkan oleh dampak-dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya:

1. meningkatnya sukuisme (sikap kedaerahan yang berlebihan).
2. perebutan kekuasaan di tingkat lokal yang semakin memicu lahirnya konflik seperti yang terlihat pada kasus beberapa Pilkada yang terjadi akhir-akhir ini.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



3. munculnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang menyebabkan biaya tinggi, pembatasan hak, dan diskriminatif.
4. otonomi daerah yang mendelegasikan urusan keuangan kepada daerah telah memicu lahirnya kasus-kasus korupsi pada elit lokal dan pengelolaan keuangan yang tidak baik.
5. konflik kelembagaan antar Pemerintah Daerah dan DPRD yang mengakibatkan tersendatnya roda pemerintahan.

Dampak-dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai konflik horizontal antar warga masyarakat seperti yang marak terjadi di beberapa daerah. Konflik-konflik tersebut akan berdampak pada kondisi Sistem Ketahanan Nasional yang telah ada. Kondisi Ketahanan Nasional yang ada di daerah sangat bergantung pada hasil pembangunan daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Hasil pembangunan daerah yang baik dapat meningkatkan Ketahanan Nasional di daerah, dan sebaliknya bila hasil pembangunan daerah kurang baik, maka kondisi Ketahanan Nasional di daerah akan semakin rapuh. Terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terus berlangsung serta konflik horizontal yang banyak disebabkan oleh fanatisme kedaerahan menjadi ancaman terhadap Ketahanan Nasional.

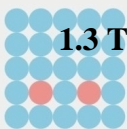
Berdasarkan latar belakang dan hasil identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. bagaimana kondisi kepemimpinan Kepala Daerah, kewirausahaan, dan Sistem Ketahanan Nasional di tujuh provinsi yang menjadi lokasi penelitian ini?
2. bagaimana peran kepemimpinan Kepala Daerah berbasis kewirausahaan dalam penerapan Sistem Ketahanan Nasional?
3. bagaimana strategi kepemimpinan Kepala Daerah berbasis kewirausahaan yang efektif dalam penerapan Sistem Ketahanan Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. mengukur dan menganalisis kondisi kepemimpinan Kepala Daerah, kewirausahaan, dan Sistem Ketahanan Nasional di tujuh provinsi yang menjadi lokasi penelitian ini.





2. menganalisis peran kepemimpinan Kepala Daerah berbasis kewirausahaan dalam penerapan Sistem Ketahanan Nasional.
3. merumuskan strategi kepemimpinan Kepala Daerah berbasis kewirausahaan yang efektif dalam penerapan Sistem Ketahanan Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang terkait dengan penerapan konsep kepemimpinan Kepala Daerah berbasis kewirausahaan dalam penerapan Sistem Ketahanan Nasional. Pengembangan ilmu yang terkait melalui penelitian ini adalah ilmu manajemen, manajemen pembangunan daerah, manajemen sumber daya manusia, dan teori-teori kepemimpinan. Sedangkan inovasi yang terkait melalui penelitian ini adalah *soft innovation*, yaitu inovasi rekayasa pengembangan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada peran kepemimpinan Kepala Daerah berbasis kewirausahaan dalam penerapan Sistem Ketahanan Nasional. Kepala Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gubernur yang merupakan pimpinan eksekutif tertinggi tingkat provinsi yang memimpin dan mengarahkan seluruh sumberdaya dan potensi daerahnya untuk mencapai kinerja terbaik dalam rangka memajukan pembangunan di daerah.

Jumlah provinsi yang menjadi lokasi penelitian adalah tujuh provinsi yang dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa tujuh provinsi tersebut mampu mewakili keragaman provinsi di Indonesia. Selain itu, para Gubernur yang akan dinilai adalah para Gubernur yang mulai menjabat sebagai Gubernur sejak tahun 2006 atau tahun-tahun sebelumnya dan saat ini masih menjabat sebagai Gubernur. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masa kepemimpinan para Gubernur tersebut sudah berlangsung selama minimal empat tahun, sehingga layak untuk dinilai keberhasilannya dalam memimpin daerah selama periode tersebut.





Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1.6 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini adalah:

1. Kajian Konsep Baru

Penelitian ini mengkaji dan menggunakan konsep kepemimpinan nasional/daerah yang baru dikeluarkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada tahun 2009 sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan implementasi konsep kepemimpinan tersebut terhadap para Kepala Daerah di Indonesia.

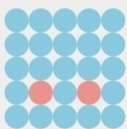
2. Informasi Baru

Penelitian ini mencoba menggali informasi terbaru mengenai permasalahan seputar kepemimpinan Kepala Daerah, kewirausahaan, dan Sistem Ketahanan Nasional di tujuh propinsi yang menjadi lokasi penelitian ini.

3. Rekomendasi Model dan Strategi atau Kebijakan Baru

Penelitian ini menghasilkan implikasi manajerial berupa model dan strategi baru yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah dalam penerapan Sistem Ketahanan Nasional yang lebih kuat dan tangguh. Terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada kalangan akademisi agar dapat menggunakan Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) sebagai indikator untuk mengukur kepemimpinan para manajer, khususnya manajer di sektor publik karena IKNI disarikan dari berbagai teori kepemimpinan yang berkembang di seluruh dunia dan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Hak cipta milik IPB, tahun 2012



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

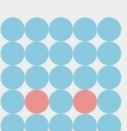
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.